

## Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

<sup>1</sup>Aperire Thalaha, <sup>2</sup>Intan Fetriana Amara, <sup>3</sup>Deris Desmawan

<sup>1</sup>Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [5553210092@untirta.ac.id](mailto:5553210092@untirta.ac.id)

<sup>2</sup>Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [5553210058@untirta.ac.id](mailto:5553210058@untirta.ac.id)

<sup>3</sup>Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [derisdesmawan@untirta.ac.id](mailto:derisdesmawan@untirta.ac.id)

### *Abstract*

*In DKI Jakarta Province, it was identified that economic growth in 2016 to 2020 was very different, therefore this proves that there is an imbalance between cities. Namely inequality in the province of DKI Jakarta. It is suspected that this is caused by the inequality between abundance, for example natural resources and human resources. This study aims to see the magnitude of the differences in development between cities in DKI Jakarta Province. Furthermore, research or analysis aims to pay attention to area grouping by measuring per capita income and economic growth. Williamson index analysis is to use the method in this study in order to have the aim of knowing how high the level of development gap is, and there is also a Klassen Typology analysis which is used to determine the area of the region. The average obtained after analyzing the Williamson Index from 2016 to 2020 is 0.5541.*

**Keywords:** Development Inequality, Klasen Typology, Williamson Index, Economic Growth, DKI Jakarta.

### **Pendahuluan**

Pembangunan ekonomi adalah cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari segi sosial sampai segi ekonomi.” Agenda pembangunan adalah cara yang tepat agar pembangunan ekonomi dapat terarah dengan baik. (Menurut UU No 25 Tahun 2004 SPPN adalah cara yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga mengaitkan masyarakat untuk menghasilkan perencanaan pembangunan dalam jangka waktu tertentu baik dalam jangka panjang, menengah dan juga tahunan.) (Syarifudin *et al.*, 2022)” (pemerintah diizinkan kekuasaan oleh pemerintah pusat dalam mengurus daerahnya sendiri. Untuk melakukan pembangunan di era otonomi daerah, rencana pembangunan daerah sinkron dengan kondisi dan spesifikasi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Tujuannya untuk mengembangkan potensi sektor ekonomi utama masing-masing daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.) (Nurhuda, Muluk and Prasetyo, 2013).

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang difungsikan untuk menilai ketercapaian pembangunan di daerah. Alasan mengapa tidak meratanya antar daerah disebabkan oleh perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi. maka dari itu pemerataan adalah kunci dari permasalahan ini. Demografis atau kekayaan seperti SDA dan SDM yang berbeda-beda

setiap daerah adalah hal utama yang mengacu pada ketimpangan. Maka dari itu hal ini sangat harus diperhatikan dan harus ditangani dengan serius. Ditunjukkan ke dua table menunjukkan gambaran bahwa terdapat PDRB Per Kapita Atas Harga Konstan antar Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2020 dan pertumbuhan ekonomi berdasarkan rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan.

Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi

Kab/Kota	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kep Seribu	0.19	1.27	1.87	-0.95	-4.94
Jakarta Selatan	6.11	6.30	6.24	6.81	-0.48
Jakarta Timur	6.15	6.25	6.10	5.03	-4.47
Jakarta Pusat	6.39	6.01	5.93	6.68	-0.65
Jakarta Barat	6.06	6.48	6.35	6.50	-0.86
Jakarta Utara	4.61	6.39	6.26	3.79	-6.22
DKI Jakarta	5.87	6.20	6.11	5.83	-2.39

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita

kab/kota	PDRB perkapita (rupiah pertahun)( $y_i = P_i / F_i$ )				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kep Seribu	276.182	301.306	338.932	317.724	234.079
Jakarta Selatan	218.999	239.134	260.945	283.969	289.569
Jakarta Timur	132.256	143.358	155.398	168.094	155.287
Jakarta Pusat	578.711	631.358	690.857	769.827	665.289
Jakarta Barat	142.774	155.171	168.585	181.609	192.975
Jakarta Utara	230.671	250.328	271.806	288.449	297.767
DKI Jakarta	210.075	228.003	247.678	268.052	262.702

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2, seperti yang sudah terlihat hasil dari table menunjukkan bahwa di tahun 2016 sampai 2022 sangat berbeda. Hasil juga menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dan juga pertumbuhan ekonomi ada yang tinggi sampai rendah. Di Jakarta selatan pada tahun 2019 yaitu 6,81 persen adalah perkembangan rata

rata laju pertumbuhan. Tetapi rata rata menunjukkan bahwa PDRB per kapita lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi DKI Jakarta. Di buktikan pula ada juga daerah yang memiliki PDRB tertinggi yaitu Jakarta Pusat. Kedua, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan rata-rata produk domestik bruto per kapita -0,512, lebih rendah dari Kepulauan Seribu, dan perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antarprovinsi DKI Jakarta.

(Raziqin and Falian, 2018)” (Untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah dapat menggunakan Indeks Williamson. Pengukuran Indeks Williamson dapat menggunakan jumlah penduduk di suatu daerah dan pendapatan per kapita.” Studi sampai saat ini telah menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan bervariasi menurut wilayah.)(Perbedaan ini disebabkan oleh heterogenitas pembangunan dan kondisi yang tidak sama) .(Prawidya Hariani RS and Syahputri, 2016)”.

’Index Williamson memberikan hasil yang bisa disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan di Sembilan provinsi di Indonesia selama tahun 2002-2014 mengalami keadaan yang berfluktuasi.” “Bahwa antara Sembilan provinsi di Indonesia selama periode 2002-2014 tingkat pemerataan pendapatan berada ditingkat ketimpangan sangat tinggi yaitu nilai indeks lebih besar dari 0,39 atau mendekati 1(satu). Indeks Williamson pendapatan terendah terdapat pada tahun 2002 dan 2010 yaitu sebesar 0,91%. Dan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2008 dengan nilai indeks Williamson pendapatan sebesar 0,99%.

Kesenjangan antar daerah (interregional disparities) sangat luar biasa. Ketimpangan ini tercermin dari kedalaman kemiskinan yang sangat bervariasi antar daerah. Secara proporsional, angka kemiskinan di provinsi selain Jawa lebih tinggi daripada di Jawa. Sangat terlihat perbedaan antara perdesaan dan perkotaan terlihat dari disparitas IPM.

Pada bulan maret 2014 di Indonesia jumlah penduduk miskin sebesar 28,28 juta orang, bila dibandingkan dengan September 2013 terjadi penurunan dari 28,60 juta orang dan persentasenya juga menurun dari 11,46% menjadi 11,25%(Kepala BPS,Suryamin,2014)” Salah satu penyebab masalah ekonomi tersebut adalah distribusi pendapatan yang tidak merata di kota-kota. Kemiskinan tidak dapat dihindari di Indonesia, di mana distribusi pendapatan tidak merata, tidak peduli seberapa kaya negara itu. Dan semakin lama ketidaksetaraan ini berlanjut, semakin buruk situasi ekonomi. Memeriksa atau mengetahui seberapa besar atau tinggi tingkat ketimpangan yang ada di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016-2020 adalah tujuan diadakannya penelitian ini.

## Metode Penelitian

### Pembangunan Ekonomi

Dengan mempertimbangkan kemajuan penduduk, adanya variasi dasar dalam wujud ekonomi suatu negara, lalu ditambah dengan pemerataan uang untuk penduduk negara itu, pembangunan ekonomi merupakan sarana untuk meningkatkan pendapatan total serta pendapatan perkapita. pendapatan modal. Kenaikan output tahunan produk dan jasa serta kegiatan ekonomi lainnya digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi. (Dolnicar *et al.*, 2015)”.

### Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi menurut (Syarifudin *et al.*, 2022), (sebagai rangka pembangunan yang dilakukan pada suatu negara/daerah dalam rangka mensejahterakan warga negara/penduduk daerah tersebut. Namun sampai detik ini belum ada definisi tunggal yang cukup menjelaskan akan ‘Pertumbuhan Ekonomi’ secara tepat.” Menurut istilah tujuan (*objectives*) dan proses (*process*) kita dapat bisa mendeskripsikanya dalam kedua hal itu.

### Ketimpangan Pembangunan

(Mopangga, 2011)( Menyoroti bagaimana pendapatan, spasial, dan karakteristik sektoral di mana kesenjangan pembangunan paling sering memanifestasikan dirinya Yang miskin semakin tidak punya dan yang kaya semakin memiliki segalanya. Daerah-daerah maju terus berkembang pesat sementara daerah-daerah yang belum berkembang stagnan, dan beberapa industri memimpin dalam hal pembangunan sementara yang lain tertinggal.) Sementara itu, ekspansi ekonomi yang pesat, yang tidak sebanding dengan pemerataan, akan menghasilkan wilayah, menurut (ketidaksetaraan 2).” Disparitas wilayah, yang dimanifestasikan sebagai wilayah maju yang dikelilingi oleh wilayah kurang berkembang atau kurang berkembang Hal ini disebabkan karena tidak mempertimbangkan apakah laju pertumbuhan lebih tinggi atau lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

### Jenis Penelitian dan Teknik Analisis Data

Hal ini yakni suatu penelitian yang bersifat kuantitatif lalu diinterpretasikan pada Kabupaten ataupun Kota di Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016 sampai 2020, yaitu selama periode lima tahun tersebut. Pendekatan pada data yang bersifat skunder dapat amati di situs resmi BPS di DKI Jakarta, merupakan penelitian yang digunakan untuk memperoleh data. Data dalam priode 2016 sampai 2020, merupakah data yang digunakan dalam analisis ini. Untuk setiap Kabupaten ataupun Kota di Provinsi DKI Jakarta, jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia, serta PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi ADHK, adalah beberapa contohnya. Provinsi DKI Jakarta menggunakan Indeks Williamson sebagai teknik untuk menilai apa yang terjadi di antar kabupaten dan kota. Selain itu, daerah tersebut diklasifikasikan menggunakan teknik Tipologi Klassen.

Menurut “(D, 1931) Pengukuran Indeks Williamson ialah Indeks yang dapat mencari tau hasil akan jumlah penduduk dan juga pendapatan perkapita.” Ketimpangan yang terjadi pada daerah dapat diketahui tinggi, jika Indeks Williamson menuju angka 1, dan ketika Indeks Williamson mendekati 0, maka yang terjadi pada suatu daerah tersebut adalah ketimpangan pembangunan yang rendah. Selanjutnya merupakan rumus untuk menghitung Indeks Williamson:

Keterangan :  $V_w$  = Indeks Williamson

$y_i$  = PDRB per kapita ADHK pada daerah i

(Rp)

$y$  = PDRB per kapita ADHK rata-rata seluruh daerah (Rp)

$f_i$  = Jumlah penduduk pada daerah i (Jiwa)

$n$  = Jumlah penduduk seluruh daerah (Jiwa)

Berdasarkan tingkat pembangunan dan struktur pertumbuhan maupun kesejahteraan masyarakat dapat dikelompokkan menggunakan Topologi Klassen untuk menjadi alat mendefinisikannya. Laju pertumbuhan ekonomi setiap daerah merupakan indicator yang dipakai berdasarkan struktur pertumbuhan. Selanjutnya, pendapatan per kapita masyarakat setiap daerah merupakan indicator yang dipakai pada tingkat pembangunan daerah. (D, 1931).

Kelompok wilayah pada matriks tipologi Klassen dibagi menjadi empat, yaitu (kuadran I) adalah daerah mapan, (kuadran II) merupakan daerah mapan tapi tertekan, (kuadran III) adalah daerah berkembang, dan (kuadran IV) yakni daerah tertinggal. Jika indicator pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita melebihi rata-rata, bisa dipastikan wilayah tersebut dianggap mapan.” Namun, ketika indikator pendapatan per kapita suatu daerah lebih tinggi dari rata-rata nasional sementara tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah, daerah tersebut biasanya dianggap sebagai daerah mapan yang tertekan. Sebaliknya, di daerah berkembang, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah berada di atas rata-rata nasional, tetapi pendapatan per kapita daerah tersebut berada dibawah rata-rata nasional.

Tabel 3. Matriks Tipologi Klassen

<b>Laju Pertumbuhan</b>	<b>Laju Pertumbuhan di Atas Rata-Rata</b>	<b>Laju Pertumbuhan di Bawah Rata-Rata</b>
<b>Pendapatan per Kapita</b>		
Pendapatan Per Kapita di Atas Rata-Rata	Daerah Maju	Daerah Maju tapi Tertekan
Pendapatan Per Kapita di Bawah Rata-Rata	Daerah Berkembang	Daerah Tertinggal

Indeks Pembangunan Manusia juga digunakan untuk mengukur indikator kesejahteraan masyarakat. Indikator indeks pendapatan perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia digunakan dalam analisis tipologi Klassen untuk mengelompokkan suatu wilayah menurut tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, dapat memanfaatkan laju pertumbuhan ekonomi Indeks Pembangunan Manusia. (Sjafrizal, 2014)” dalam, (Syarifudin *et al.*, 2022).

## Landasa Teori

### Teori Ketimpangan Ekonomi

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (Developed Region) dan daerah terbelakang (Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di

berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negaranegara maju. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya oleh Williamson (1966) melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section.

Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012).

Simon Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet "U-Terbalik", karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.

### **Teori Ekonomi Pembangunan**

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses terjadinya kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang berlangsung dalam jangka panjang. Dari definisi itu kita menemukan ada tiga unsur yang harus ada dalam pembangunan yaitu proses, peningkatan pendapatan perkapita penduduk dan berlangsung terus menerus dalam jangka panjang.

### **Teori-Teori Pembangunan**

Teori pembangunan dikelompokkan dalam apa yang disebut dengan teori modernisasi dan teori struktural. Teori modernisasi adalah teori yang menjelaskan bahwa kemiskinan terutama disebabkan oleh faktor-faktor internal atau faktor yang terdapat di dalam negeri bersangkutan, sehingga diperlukan perbaikan internal. Teori modernisasi mendominasi pemikiran tentang teori pembangunan dalam literatur ekonomi arus utama

### **Teori Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )**

Upaya untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi secara komprehensif dalam negara berkembang maupun negara maju telah dilakukan oleh



United Nations Development Programme (UNDP) dalam Human Development Report (HDR). HDI mencoba untuk memberi peringkat semua Negara dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia terendah) hingga 1 (tingkat pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan tiga tujuan atau produk akhir.

### Hasil Dan Pembahasan

Analisis Indeks Williamson merupakan alat yang mengukur tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar suatu Kabupaten ataupun Kota di Provinsi DKI Jakarta pada 2016 sampai dengan 2020, ditemukan bahwa adanya ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta naik pada periode 2016 sampai dengan 2018, lalu pangkat sautu ketidakseimbangan pembangunan yang terjadipun tergolong tinggi. Selanjutnya, diketahui bahwa terjadi penurunan pada periode 2018 sampai 2020 pada ketimpangan pembangunan. Rata-rata hasil dari Indeks Williamson pada periode 2016 sampai 2020 sebesar 0,5541, karena hal itu mendekati rata-rata kemudian dapat disimpulkan bahwa ketimpangan uang terjadi cukup tinggi. Dapat dilihat dari hasil Indeks Williamson tersebut menandakan yang terjadi pada pembangunan di Provinsi DKI Jakarta belum cukup merata sehingga sangat menunjukkan adanya ketimpangan antar daerah yang tergolong tertinggal maupun maju.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta(%)

Kab/Kota	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kep Seribu	0.19	1.27	1.87	-0.95	-4.94
Jakarta Selatan	6.11	6.30	6.24	6.81	-0.48
Jakarta Timur	6.15	6.25	6.10	5.03	-4.47
Jakarta Pusat	6.39	6.01	5.93	6.68	-0.65
Jakarta Barat	6.06	6.48	6.35	6.50	-0.86
Jakarta Utara	4.61	6.39	6.26	3.79	-6.22
DKI Jakarta	5.87	6.20	6.11	5.83	-2.39
jumlah	35.38	38.90	38.86	33.69	-20.01
rata-rata	3.62				

Bisa kita lihat pada Tabel 5 Pandemi yang terjadi Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020 membuahakan laju suatu pertumbuhan suatu ekonomi di Provinsi DKI Jakarta di 2020 menghadapi kontraksi -13,85 persen, kemudian laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta juga pada periode 2016-2020 menghadapi fluktuatif. Berdasarkan data yang diperoleh yaitu umumnya proses pertumbuhan ekonomi pada kabupaten ataupun kota di Provinsi DKI Jakarta di periode 2016-2020, daerah dengan kecepatan pertumbuhan pada ekonomi dibawah umumnya adalah daerah Kota Kepulauan Seribu 0.19 persen; Jakarta Selatan adalah 6.11 persen; Jakarta Timur adalah 6.15 persen; Jakarta Pusat adalah 6.39 persen; Jakarta Barat 6.06 persen, dan Jakarta Utara sebesar 4.61 persen.

Tabel 6. PDRB Per Kapita ADHK Menurut Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta (%)

kab/kota	PDRB perkapita (rupiah pertahun)( $y_i = P_i / F_i$ )					jumlah
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kep Seribu	276.182	301.306	338.932	317.724	234.079	1468.223
Jakarta Selatan	218.999	239.134	260.945	283.969	289.569	1292.616
Jakarta Timur	132.256	143.358	155.398	168.094	155.287	754.393
Jakarta Pusat	578.711	631.358	690.857	769.827	665.289	3336.042
Jakarta Barat	142.774	155.171	168.585	181.609	192.975	841.114
Jakarta Utara	230.671	250.328	271.806	288.449	297.767	1339.021
DKI Jakarta	210.075	228.003	247.678	268.052	262.702	1216.51
jumlah	1789.668	1948.658	2134.201	2277.724	2097.668	
rata-rata	292.7976857					1463.988429

Pada data diatas. PDRB PerKapita ADHK pada Provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan alasan yang sama yaitu pandemic Covid-19, namun sebelumnya empat tahun berturut turut pada tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan pada periode 2016 sampai 2019. Bisa dilihat juga pada data table.4 tidak ada satu pun daerah yang memiliki pendapatan perkapita diatas rata-rata.

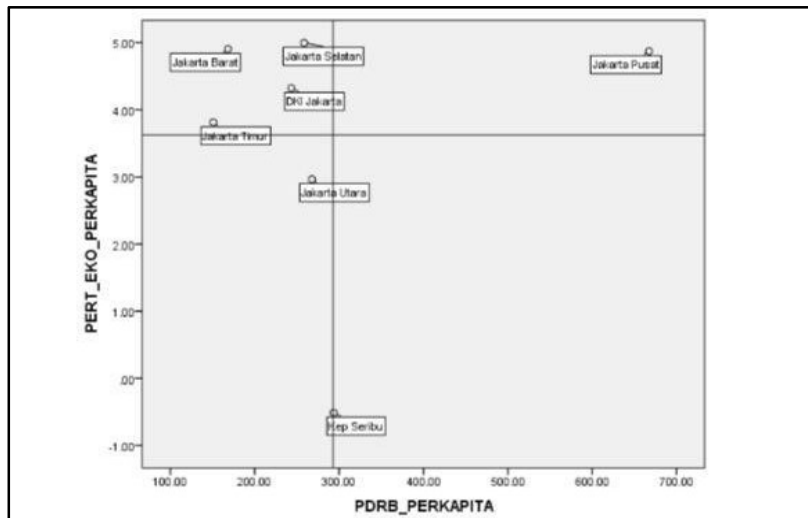
Tabel 7. IPM Menurut Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta (%)

kab/kota	IPM					rata-rata
	2016	2017	2018	2019	2020	
Kep Seribu	60.69	70.11	70.91	71.4	71.63	68.948
Jakarta Selatan	83.93	84.13	84.44	84.75	84.72	84.394
Jakarta Timur	81.3	81.61	82.06	82.69	82.66	82.064
Jakarta Pusat	80.24	80.49	81.01	81.24	81.39	80.874
Jakarta Barat	80.37	80.47	80.88	81.21	81.38	80.862
Jakarta Utara	78.81	79.47	79.87	80.17	80.29	79.722
DKI Jakarta	79.6	80.06	80.47	80.76	80.77	80.332

Pada data diatas, Pertumbuhan yang terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terjadi pada Provinsi DKI Jakarta selalu menyumbang pengembangan. Daerah yang mempunyai hasil nilai umum indeks pembangunan manusia pada periode 2016 sampai 2020 diatas umumnya Provinsi DKI Jakarta sebesar 79.59 persen adalah Kota Jakarta Utara sebesar 79.72 persen; Kota Jakarta Barat sebesar 80.82 persen; Kota Jakarta Pusat sebesar 80.84 persen; Kota Jakarta Jakarta Timur sebesar 82.06 persen, dan Kota Jakarta Selatan sebesar



84.39 persen.



Gambar 1. Klasifikasi Daerah Berdasarkan PDRB Perkapita ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Antar Kab/Kota di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2016-2020

Hasil dari besar wilayah pada Provinsi DKI Jakarta ada pada kuadran III artinya menunjukkan wilayah berkembang baik menurut Tipologi Kelas Antar Kabupaten ataupun Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sampai 2020. DKI Jakarta, lalu Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan mungkin Jakarta Timur termasuk di antaranya. (Syaifudin *et al.*, 2022).

Daerah-daerah di kuadran IV kemudian dikategorikan sebagai daerah tertinggal karena tidak mampu meningkatkan pertumbuhannya ke tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Selain itu, hanya Jakarta Pusat yang masuk dalam daftar.

### Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil analisis, dapat dilihat tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi pada Kabupaten ataupun Kota di Provinsi DKI Jakarta di 2016 sampai 2020 tergolong cukup tinggi. Nilai umum Indeks Williamson dari tahun 2016 sampai 2020 ialah 0,5541. Masalah social yang biasa terjadi di Indonesia salah satu faktornya adalah adanya ketidakseimbangan pembangunan yang diatas nilai umumnya antar Kabupaten ataupun Kota di Provinsi DKI Jakarta. Solusi yang mungkin bisa diambil pemerintah adalah dengan adanya kebijakan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan dengan diwujudkannya pembangunan- pembangunan yang rata disetiap daerah. Daerah berkembang merupakan hasil sebagian besar dari Tipologi Klasen pada Kabupaten ataupun Kota di Provinsi DKI Jakarta di 2016 sampai 2020. Daerah yang termasuk dalam daerah berkembang ini adalah DKI Jakarta, lalu Jakarta Selatan, serta Jakarta Barat dan juga Jakarta Timur. Oleh kaarena itu besar harapan terhadap pemerintah untuk dapat membuat prosedur dan haluan dalam memperdayakan serta mengelola kemampuan setiap daerah kemudian menaikan adanya penanaman aktiva awal dalam rancangan untuk menaikan metode pertumbuhan ekonomi daerah.

### Daftar Pustaka

- D, S. (1931) 'Scholar (4)', pp. 167–168. doi: 10.1163/\_q3\_SIM\_00374.
- Dolnicar, S. *et al.* (2015) 'Scholar (3)', *Annals of Tourism Research*, pp. 1–2. Available at: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160738315000444>.
- Mopangga, H. (2011) 'Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo Herwin Mopangga SEKOLAH PASCASARJANA', *Trikonomika*, 10(1), pp. 40–51.
- Nurhuda, R., Muluk, M. R. K. and Prasetyo, W. Y. (2013) 'Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), pp. 110–119.
- Prawidya Hariani RS and Syahputri, A. R. (2016) 'Analisis Ketimpangan Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kriminalitas di Propinsi Sumatera Utara', *Jurnal Ekonomi*, 16(1), p. 77358.
- Raziqiin, K. dan T. A. F. and Falian, T. A. (2018) 'Analisis Dampak Kepemilikan Surat Berharga Oleh Bpd Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah', *Majalah Ilmiah Bijak*, 14(1), pp. 32–47. doi: 10.31334/bijak.v14i1.58.
- Syaifudin, R. *et al.* (2022) 'Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Klasifikasi Wilayah antar Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020', 3(2), pp. 117–124. doi: 10.47065/jbe.v3i2.88.